

**EFEKTIFITAS PENYELESAIAN NAFKAH KADALUWARSA
(TAQADUM) DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDY KASUS DI KECAMATAN BANGKINANG
SEBERANG)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam
Di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau



Oleh

YUSMARDI
NIM: 10621003682

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2011**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“EFEKTIFITAS PENYELESAIAN NAFKAH KADALUWARSA (TAQADUM) DITINJAU DARI PERSPEKTIF HOKUM ISLAM (Studi Kasus di Kecamatan Bangkinang Seberang)”**. Shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW selaku utusan Allah SWT yang membawa risalahnya kepada umat manusia.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak menemui kesulitan, namun berkat izin Allah SWT dan atas bantuan bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil, Alhamdulillah semuanya bisa di atasi. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ungkapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Ayahanda tercinta Hasyim, dan ibunda tercinta Rohana yang telah mengorbankan kebahagiaannya demi kebahagiaan penulis dan memberikan kasih sayang, perhatian serta senantiasa mendo'akan penulis dalam menuntut ilmu agar menjadi manusia yang patuh terhadap agama dan berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsa. serta seluruh keluarga yang turut mendo'akan dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Rektor dan bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, pembantu Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, bapak ketua serta ibu sekretaris jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah yang memberikan kesempatan perhatian dan fasilitas kepada penulis selama pendidikan dan khususnya selama penulisan skripsi ini.

3. bapak Zulfahmi Nur, M.A selaku pembimbing yang telah memberikan perhatian, pengarahan, bimbingan serta kesabaran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum karyawan-karyawati yang telah mendidik dan membantu penulis selama perkuliahan ini.
5. Bapak pimpinan beserta staf pustaka UIN Suska Riau yang telah memberikan fasilitas perpustakaan kepada penulis selama perkuliahan ini.
6. Tokoh masyarakat yang telah bersedia diwawancarai dalam membantu penulisan guna mendapatkan data yang diperlukan.
7. Teman-teman seperjuangan angkatan 2006 serta semua pihak yang telah memberikan dorongan sehingga terwujudnya penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari penulisan skripsi ini jauh dari sempurna, masih terdapat kelemahan baik dari segi materi, teknik penulisan dan segi bahasa yang disampaikan, oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini berguna bagi yang membacanya sekurang-kurangnya bagi penulis. Amin.....

Pekanbaru, 01 November 2011
Penulis

YUSMARDI
NIM.10621003682

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul ***“EFEKTIFITAS PENYELESAIAN NAFKAH KADALUWARSA (TAQADUM) DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Kecamatan Bangkinang Seberang)”***. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pengaduan yang disampaikan istri kepada tokoh-tokoh agama di Kecamatan Bangkinang Seberang yang menyampaikan perihal suaminya yang tidak menafkahi istri dan anak-anaknya selama bertahun-tahun.

Ruang lingkup penelitian ini adalah sebagian masyarakat Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan mengumpulkan data langsung dari sebagian masyarakat Kecamatan Bangkinang Seberang yang melakukan tuntutan nafkah dengan metode pengumpulan data observasi dan wawancara. Setelah data terkumpul penulis menulis data tersebut secara deskriptif dan dianalisis.

Di Akhir penelitian penulis menyimpulkan bahwa prinsip hukum tentang kewajiban memberi nafkah anak dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan dalam hukum Islam hakikatnya membebankan kewajiban tersebut kepada orang tua laki-laki (ayah). Efektifitas penyelesaian nafkah kadaluwarsa atau taqadum yang tidak ditunaikan oleh suami kepada istri dan anak-anaknya tidak diselesaikan di pengadilan agama, sebab sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, menyebutkan sesungguhnya tidak ada nafkah kadaluwarsa atau taqadum atau nafkah madhiyah untuk anak, oleh karenanya efektifitas penyelesaiannya adalah musyawarah tokoh agama di Kecamatan Bangkinang Seberang.

Faktor-faktor yang menyebabkan suami tidak memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya adalah sebagai berikut: Faktor ekonomi, artinya Suami tidak memberikan nafkah karena ia sedang dalam kesulitan, sehingga menyebabkan suami tidak member nafkah kepada istrinya. Faktor Keengganan, factor ini adalah si suami enggan memberikan nafkah kepada istrinya padahal ia berada dalam keadaan lapang.

Dalam hukum Islam, adalah kewajiban ayah/suami yang menafkahi istri dan anak-anaknya, termasuk kewajiban menafkahi nafkah yang sudah kadaluwarsa atau taqadum, jika ayah/suami menelantarkan kewajiban menafkahi istri dan anak-anaknya, maka ayah/suami dapat dituntut untuk mengganti rugi nafkah istri dan anak, juga dapat diancam dengan hukuman ta'zir. Lima, Nafkah anak menjadi gugur dengan kadaluwarsa jika ternyata selama anak tidak mendapat nafkah dari ayahnya ia mapu membiayai diri dengan hartanya sendiri. Namun, nafkah tidak menjadi gugur disebabkan kadaluwarsa jika ternyata sela ia tidak mendapat nafkah dari ayahnya si anak harus berhutang untuk pembiayaannya sendiri. Dalam hal ini si anak berhak menuntut ganti rugi atas nafkah masa lampau yang belum diterima dari ayahnya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN

SURAT PERNYATAAN

KATA PENGANTAR..... i

ABSTRAK iv

DAFTAR ISI..... v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Metode Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan.....	9

BAB II TINJAUAN LOKASI PENELITIAN

A. Geografi dan Demograf	11
B. Kehidupan Beragama.....	16
C. Pendidikan.....	18
D. Adat Istiadat dan Sosial Budaya	21

BAB III TINJAUAN TEORITIS TENTANG NAFKAH

A. Pengertian Nafkah.....	23
B. Pembagian Nafkah	24
C. Pengertian Nafkah Taqadum (Kadaluwarsa)	34

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN NAFKAH KADALUWARSA (TAQADUM)

A. Efektifitas Penyelesaian Nafkah Kadaluwarsa di Kecamatan Bangkinang Seberang	37
B. Faktor-Faktor Penghambat Penyelesaian Nafkah Kadaluwarsa	40
C. Tinjauan Hukum Islam	42

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	51
B. Saran	51

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran

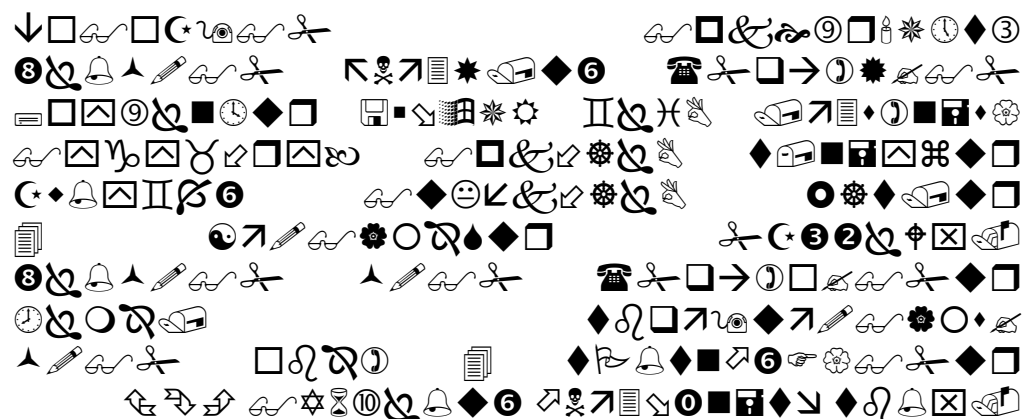
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah tidak menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya, tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah adakan hukum sesuai dengan martabatnya. Sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling meridhai, dengan upacara ijab qabul sebagai lambang adanya rasa ridha-meridhai, dan dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan kalau pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat. Peraturan perkawinan seperti inilah yang diridhai Allah dan diabadikan Islam untuk selamanya.¹

Firman Allah:



Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya

¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung. PT. Alma'arif, 1980) hal 7-8

kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu.

Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maksud dilaksanakannya perkawinan adalah untuk hidup dalam pergaulan yang sempurna yang merupakan jalan yang amat mulia untuk mengatur rumah tangga dan anak-anak yang akan dilahirkan sebagai satu pertalian yang amat teguh guna memperkokoh pertalian persaudaraan antara kaum kerabat suami dengan kaum kerabat istri yang pertalian itu akan menjadi suatu jalan yang membawa kepada saling menolong antara satu kaum dengan yang lain, dan akhirnya rumah tangga tersebut menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak perdataan biasa, akan tetapi mempunyai nilai ibadah². Oleh karena itu, suami istri dalam suatu perkawinan mempunyai pertanggungjawaban secara vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa di samping mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik suami dan istri serta anak-anak yang lahir dalam perkawinan. Namun dalam pergaulan antara suami tidak jarang terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus maupun sebabsebab lain yang kadang-kadang menimbulkan suatu keadaan yang menyebabkan suatu perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi, sedangkan upaya-upaya damai

² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hal. 69.

yang dilakukan oleh kedua belah pihak maupun keluarga tidak membawa hasil yang maksimal sehingga pada akhirnya jalan keluar yang harus ditempuh tidak lain adalah perceraian.

Seperti halnya perkawinan yang menimbulkan hak dan kewajiban, perceraian membawa akibat-akibat hukum bagi kedua belah pihak dan juga terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Anak-anak tersebut harus hidup dalam suatu keluarga yang tidak harmonis sebagaimana mestinya misalnya harus hidup dalam suatu keluarga dengan orang tua tunggal seperti dengan seorang ibu atau dengan seorang ayah saja.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa anak merupakan penerus bangsa yang mengemban tugas bangsa yang belum terselesaikan oleh generasi-generasi sebelumnya. Sebagai penerus cita-cita bangsa dan negara, anak harus dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa yang sehat rohani dan jasmani, cerdas, bahagia, berpendidikan dan bermoral tinggi. Untuk itu, anak tersebut harus memperoleh kasih sayang, perlindungan, pembinaan, dan pengarahan yang tepat. Untuk mencapai kondisi ideal seperti di atas tentunya bukan tugas negara dan masyarakat semata tetapi terutama merupakan tugas dan tanggung jawab orang tua.

Dalam ajaran Islam, anak justru yang sangat berguna bagi orang tua setelah ia meninggal dunia yaitu adanya amal yang tidak terputus dari anak yang soleh (*human ment*). Secara kemasyarakatan, anak mempunyai peranan penting antara lain sebagai penyambung keturunan dan ahli waris Bahkan

dalam hukum adat, anak adalah sebagai penerus keturunan, penerus kekerabatan dan sebagai kelanjutan dari keputusan orang tuanya.

Namun meskipun telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan adanya kecenderungan internasional yang memfokuskan perhatian terhadap anak, pada kenyataannya masih banyak anak yang tidak beruntung (*disadvantaged children*) dalam mencukupi kehidupannya. Sebagai salah satu faktor ketidak beruntungan anak dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya baik dilihat dari aspek rohani maupun aspek jasmani berupa pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dan pendidikan yang layak bagi anak adalah akibat adanya perceraian kedua orang tuanya. Baik Undang-Undang No.1 Tahun 1974 maupun Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lainnya yang dijadikan hukum materil oleh pengadilan agama dalam memutus perkara-perkara perceraian dalam pasal-pasal nya dengan tegas mengatur tentang kewajiban orang tua terhadap biaya nafkah anak setelah terjadinya perceraian yang pada hakikatnya membebankan kewajiban itu kepada orang tua laki-laki (ayah).

Masyarakat Kecamatan Bangkinang Seberang mayoritas beragama Islam dan memiliki kesadaran beragama yang cukup tinggi, kesadaran beragama ini terlihat dari maraknya aktivitas keagamaan dalam kehidupan sehari-hari, seperti memasukan anaknya ke lembaga pendidikan agama terutama pada pendidikan di pondok pesantren.

Penulis melihat pihak keluarga istri yang menjadi korban tunggal dalam memegang tanggung jawabnya terhadap anak, sedangkan pihak suami merasa tidak bertanggung jawab, di Bangkinang seberang biasanya setelah terjadi perceraian akibat kematian (istri), pemeliharaan anak kebanyakan berada pada pengasuhan pihak keluarga ibunya dan sangat jarang sekali berada pada pengawasan bapaknya, hal ini sesuai dengan prinsip Matrilineal yang dianut masyarakat pada umumnya. kebutuhan anak menjadi terabaikan oleh bapaknya, karena seorang bapak tidak merasa ada tuntutan dalam tanggung jawab terhadap anaknya, yang muncul dari seorang bapak hanyalah sifat kesadaran saja kapan jumpa dengan anaknya baru ia merasa ingin memberi kepada anaknya tersebut, apalagi kalau seorang bapak telah melakukan pernikahan yang baru dengan perempuan yang lain, boleh dikatakan pemeliharaan anak kadangkala menjadi tanggung jawab di pihak keluarga isteri sepenuhnya.

Pemeliharaan anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Pemeliharaan dalam hal ini meliputi berbagai hal, masalah ekonomi, pendidikan, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak. Dalam konsep Islam, tanggung jawab ekonomi berada dipundak suami sebagai kepala rumah tangga. Meskipun dalam hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa isteri dapat membantu suami dalam menanggung kewajiban ekonomi tersebut.

Adanya kelalaian untuk memberikan nafkah sehingga pihak yang wajib dinafkahnya menjadi terlantar, merupakan permasalahan yang sering

terjadi di kalangan masyarakat Islam, tidak terkecuali di Kecamatan Bangkinang Seberang. Kenyataan seperti tersebut sering terutama dalam masyarakat yang kurang pengetahuannya tentang bagaimana cara memperoleh suatu hak. Dalam masyarakat seperti itu pihak yang dilantarkan haknya hanya menyerahkan nasibnya kepada rasa kasihan pihak yang mempunyai kewajiban. Akibatnya, tidak sedikit anak yang terlantar dibiarkan begitu saja oleh ayahnya tanpa ada pembelaan.

Berikut ini akan disebutkan tiga contoh kasus gugatan kadaluarsa nafkah: Kasus pertama seorang istri yang bernama Ermita yang memiliki empat orang anak dari seorang suami bernama Anton. Si suami yang bekerja di Malaysia dalam beberapa tahun terakhir tidak lagi memberi nafkah kepada istri dan empat orang anaknya, pada akhir tahun 2009 istri mengadukan perihal suaminya kepada keluarga yang telah melalaikan kewajibannya memberi nafkah istri dan empat orang anaknya. Si isteri menyebutkan kepada pihak keluarga bahwa sejak tiga tahun terakhir atau tepatnya sejak tahun 2006 hingga akhir 2009, suaminya telah melalaikan kewajibannya memberi nafkah istri dan empat orang anaknya, setelah mendengar pengaduan isteri atas kelalaian kewajiban suami yang tidak lagi memberi nafkah selama tiga tahun, pihak keluarga istri mengadukan kepada keluarga untuk dicari jalan penyelesaiannya.³

Kasus kedua isteri yang bernama Nurlela yang memiliki tiga orang anak dari seorang suami yang Amril yang bekerja di Jakarta sebagai

³ Ernita (Isteri), Wawancara, 20 April 2010

wiraswasta dalam beberapa tahun terakhir tidak lagi memberi nafkah kepada istri dan empat orang anaknya, pada akhir tahun 2009 istri mengadukan perihal suaminya kepada keluarga yang telah melalaikan kewajibannya memberi nafkah istri dan empat orang anaknya. Si isteri menyebutkan kepada pihak keluarga bahwa sejak tiga tahun terakhir atau tepatnya sejak tahun 2006 hingga akhir 2009, suaminya telah melalaikan kewajibannya memberi nafkah istri dan tiga orang anaknya.⁴

Kasus ketiga istri yang bernama Upik yang memiliki lima orang anak dari seorang suami yang bekerja di Sumatera Barat sebagai seorang supir dalam beberapa tahun terakhir tidak lagi memberi nafkah kepada istri dan empat orang anaknya, pada akhir tahun 2009 istri mengadukan perihal suaminya kepada keluarga yang telah melalaikan kewajibannya memberi nafkah istri dan empat orang anaknya. Si isteri menyebutkan kepada pihak keluarga bahwa sejak tiga tahun terakhir atau tepatnya sejak tahun 2007 hingga akhir 2010, suaminya telah melalaikan kewajibannya memberi nafkah istri dan lima orang anaknya, pihak keluarga istri mengadukan kepada tokoh agama kecamatan kegerian Bangkinang Seberang untuk dicari jalan penyelesaiannya.⁵

Berangkat dari pemikiran di atas penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk karya ilmiah dengan judul

EFEKTIFITAS PENYELESAIAN NAFKAH KADALUAWARSA

⁴ Nurlela (isteri), Wawancara, 21 April 2010

⁵ Upik (isteri), Wawancara, 5 Mei 2010

**(TAQADUM) DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDY KASUS DI KECAMATAN BANGKINANG SEBERANG)**

B. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya penelitian ini, maka penulis membatasi tentang nafkah istri dan anak-anaknya bagi suami yang merantau dari tahun 2008 hingga 2009 menurut Tinjauan Hukum Islam Terhadap nafkah Kadaluwarsa atau taqadum.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka penulis mencoba mengadakan penelitian dalam rangka menjawab permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana efektifitas penyelesaian nafkah kadaluwarsa nafkah di Kecamatan Bangkinang Seberang?
2. Apa factor-faktor yang menjadi hambatan dalam penyelesaian nafkah kadaluwarsa di Kecamatan Bangkinang Seberang?
3. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian nafkah kadaluwarsa (taqadum) ?

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam hal ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dengan jelas bagaimana sesungguhnya yang dimaksud dengan kadaluwarsa (taqadum) nafkah)
 - b. Untuk mengetahui factor-faktor yang menjadi hambatan dalam kadaluwarsa (taqadum) nafkah
 - c. Untuk mengetahui dengan jelas tinjauan hukum Islam tentang kadaluwarsa (taqadum) nafkah.
2. Kegunaan Penelitian
- a. Sebagai bahan informasi dan sumbangan bagi para pembaca.
 - b. Untuk menambah pengetahuan penulis tentang gugatan kadaluwarsa (taqadum) nafkah.
 - c. Sebagai salah satu syarat untuk mengajukan permohonan penelitian skripsi di fakultas syari'ah UIN SUSKA RIAU.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kecamatan Bangkinang Seberang, karena penulis melihat adanya kasus istri dan anak-anak yang diterlantarkan nafkah oleh suami/ayah, yang kemudian istri dan anak-anak menuntut nafkah dalam hal ini kadaluwarsa (taqadum) nafkah dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tuntutan kadaluwarsa (tawadum) nafkah.

2. Subjek dan Objek penelitian

Subjek penelitian adalah isteri dan anak-anak yang diterlantarkan nafkahnya oleh suami/ayah, dan yang menjadi objek adalah tuntutan dari

istri dan anak-anak terhadap kadaluwarsa (taqadum) nafkah di Kecamatan Bangkinang Seberang.

3. Populasi dan Sampel

Adapun jumlah populasi dalam penelitian ini sekitar 10 orang, karena populasinya tidak terlalu besar maka penelitian ini tidak menggunakan sample.

4. Sumber Pengumpulan Data

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden dilapangan dengan menggunakan alat pengumpul data berupa observasi dan wawancara sehubungan dengan pokok penelitian.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan judul yang diteliti.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Dalam penelitian ini.mengadakan pengamatan secara langsung terhadap tuntutan kadaluwarsa (taqadum) nafkah di Kecamatan Bangkinang Seberang.

b. Wawancara

Penulis mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada responden, yang mengalami permasalahan yang di teliti.

6. Analisa Data

Untuk menganalisa data yang diperoleh digunakan analisa data kualitatif dan analisa data kuantitatif. Analisa data kualitatif adalah data-data yang sudah terkumpul diklasifikasikan, diuraikan dan dibandingkan

antara satu dengan yang lain sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.

7. Metode Penulisan

Penulisan dalam penelitian ini menggunakan metode penulisan, yaitu:

- a. Metode Induktif adalah metode bertolak dari koedah khusus kemudian ditarik kesimpulan secara umum.
- b. Metode deduktif adalah metode penulisan yang bertolak dari kaedah yang umum kemudian ditarik kesimpulan yang khusus.
- c. Metode Deskriptif adalah metode menguraikan dan menggambarkan data menurut apa adanya.

F. Sistematika Penulisan

Sebagaimana layaknya sebuah tulisan, maka diperlukan sistematika penulisan yang sehingga dapat diperoleh gambaran penulisan secara utuh sesuai dengan masalah. Sistematika penulisan terdiri dari lima bab:

- | | |
|---------|--|
| BAB I | Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulis. |
| BAB II | Tinjauan umum tentang lokasi penelitian, letak geografis dan demografis wilayah, agama, mata pencaharian penduduk dan sosial kemasyarakatan. |
| BAB III | Tinjauan teoritis tentang nafkah yang terdiri dari, pengertian nafkah, pembagian nafkah dan pengertian kadaluwarsa nafkah |

- BAB IV** Pembahasan yang meliputi Tinjauan Hukum Islam Terhadap penyelesaian Kadaluarsa Nafkah yang meliputi, Bagaimana penyelesaian kadaluwarsa nafkah di Kecamatan Bangkinang Seberang? Factor-faktor yang menjadi hambatan dalam penyelesaian kadaluwarsa (taqadum) nafkah, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kadaluwarsa (taqadum) nafkah
- BAB V** Kesimpulan dan saran

BAB II

GAMBARAN UMUM KECAMATAN BANGKINANG SEBERANG

A. Geografi dan Demografi

Kecamatan Bangkinang Seberang merupakan kecamatan yang baru berdiri yang diresmikan pada tanggal 16 Desember 2006 terpisah dari kecamatan induknya yaitu Kecamatan Bangkinang. Pemisahan kecamatan ini berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar nomor 22 Tahun 2003 tanggal 10 November 2003 tentang pembentukan Kecamatan Bangkinang Seberang, Salo, Kampar Utara, Rumbio Jaya, Kampar Timur, Kampar Kiri Tengah, Gunung Sahilan, dan Perhentian Raja.¹

Wilayah Kecamatan Bangkinang Seberang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar nomor 22 tahun 2003 masing-masing berbatas dengan :

1. Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Tapung
2. Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Kampar Utara
3. Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Bangkinang
4. Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Salo.

Kecamatan Bangkinang Seberang terletak antara 00.3⁰⁰ sampai 00.20⁰⁰ Lintang Utara dan 100.55⁰⁰. Bujur Timur, Kecamatan Bangkinang Seberang merupakan dataran rendah, perbukitan serta daerah yang dialiri oleh sungai Kampar. Keadaan geografis alam Kecamatan Bangkinang Seberang

¹ Sumber Data : Kantor Camat Bangkinang Seberang

sangat cocok untuk pertanian dan perkebunan sehingga yang menjadi komoditi utama adalah sawit, karet, padi sawah, perikanan dan hasil galian²

Kecamatan Bangkinang Seberang mempunyai luas 13 Km² atau 16.687 Ha. Untuk lebih jelasnya penggunaan tanah dan perkebunan setiap desa/kelurahan tahun 2009 dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL I
PENGUNAAN TANAH DAN PERKEBUNAN SETIAP
DESA/KELURAHAN TAHUN 2009

NO	DESA/KEL	TANAH SAWAH	TANAH PERKEBUNAN	PEMUKIMAN	LAIN-LAIN
1	Pulau Lawas	-	365 Ha	462 Ha	140 Ha
2	Muara Uwai	-	1.153 Ha	567 Ha	382 Ha
3	Pulau	113 Ha	345 Ha	458 Ha	322 Ha
4	Pasir Sialang	197 Ha	1.625 Ha	908 Ha	1.763
5	Bkt Sembilan	-	603 Ha	197 Ha	Ha
6	Laboi Jaya	-	1.502 Ha	607 Ha	16 Ha
7	Suku Mulya	-	786 Ha	438 Ha	335 Ha
8	Bukit Payung	-	903 Ha	520 Ha	291 Ha
9	Binuang	85 Ha	124 Ha	188 Ha	217 Ha
					3 Ha
JUMLAH		613 Ha	7. 610 Ha	5.145 Ha	3.319 Ha

Sumber : Dokumen Kecamatan Bangkinang Seberang

Dari tabel di atas tergambar bahwa penggunaan tanah lebih banyak terpakai untuk lahan perkebunan, yaitu sekitar 7.610 Ha atau 45,60% penggunaan tanah untuk pemukiman, yaitu sekitar 5.145 Ha atau 30, 83% untuk lahan yang belum digarap sekitar 3.319 Ha atau 19,88% dan tanah persawahan sekitar 613 Ha atau 3,67%.

Komoditi perkebunan yang terdapat di Kecamatan Bangkinang Seberang yaitu : Karet, Kelapa Sawit, dan Kelapa. Untuk lebih jelasnya

² Sumber Data : Kantor Camat Bangkinang Seberang

perkebunan rakyat yang ada disetiap Desa/Kelurahan Tahun 2009 seperti yang terdapat pada tabel berikut :

TABEL II
KOMODITI PERKEBUNAN YANG TERDAPAT DI KECAMATAN
BANGKINANG SEBERANG

No	DESA/KEL	JENIS USAHA PERKEBUNAN (HA)				JMLH
		KARET	K. SAWIT	KELAPA	KOPI	
1	Pulau Lawas	-	82	16	1	99
2	Muara Uwai	334	85	23	-	542
3	Pulau	206	170	15	2	393
4	Pasir Sialang	964	1.414	23	3	2.404
5	Bkt Sembilan	23	194	-	-	217
6	Laboi Jaya	30	122	-	-	152
7	Suku Mulya	68	113	2	-	183
8	Bukit Payung	28	152	-	-	180
9	Binuang	74	78	7	1	160
TOTAL		1.727	2.510	86	7	4.330

Sumber data : Dokumen Kecamatan Bangkinang Seberang

Dari tabel di atas dapat diambil kesimpulan bahwa mayoritas usaha masyarakat Bangkinang Seberang adalah karet dan sawit, hal ini dapat dilihat dari luasnya areal tanah yang dijadikan sebagai lahan perkebunan.

Sedangkan untuk hasil tambang Kecamatan Bangkinang Seberang mempunyai lokasi galian yang sangat efektif dan membantu perekonomian rakyat serta mengurangi angka pengangguran, namun saat ini keberadaan tambang galian sudah mulai merusak keseimbangan lingkungan hidup yang bisa mengakibatkan bencana sewaktu-waktu akibat banyaknya penambang liar. Kondisi alam yang banyak sungai dan rawa juga mengakibatkan masyarakat berternak kerbau yang dilepas dirawa.

Penduduk Bangkinang Seberang sebagian besar merupakan penduduk asli yang sudah turun temurun menetap di Kecamatan Bangkinang Seberang.

Menurut monografi tahun 2010 penduduknya berjumlah 28.356 Jiwa yang terdiri dari masyarakat tempatan dan masyarakat pendatang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini

TABEL III
JUMLAH PENDUDUK KECAMATAN BANGKINANG SEBERANG
BERDASARKAN DESA/KELURAHAN

NO	DESA/KELURAHAN	JLH PENDUDUK	JMLH KK
1	Pulau Lawas	2. 901 Jiwa	727
2	Muara Uwai	3. 511 Jiwa	765
3	Pasir Sialang	8. 034 Jiwa	2. 218
4	Pulau	3.078 Jiwa	772
5	Suka Mulya	2. 373 Jiwa	597
6	Laboi Jaya	2. 645 Jiwa	720
7	Bukit Payung	2. 494 Jiwa	619
8	Bukit Sembilan	1.604 Jiwa	383
9	Binuang	1.707 Jiwa	400
JUMLAH		28. 356 Jiwa	7. 201 KK

Sumber data : Monografi Kecamatan Bangkinang Seberang

Dari jumlah penduduk di atas tergambar bahwa desa Pasir Sialang merupakan penduduk yang terbanyak dibandingkan dengan delapan desa lainnya yaitu sebanyak 8.034 jiwa atau 28,33%.

B. Kehidupan Beragama

Agama mempunyai peranan penting di dalam kehidupan manusia, karena kehidupan manusia di alam raya ini ibarat sebuah lalu lintas, dimana masing-masing ingin berjalan dengan selamat dan sekaligus ingin cepat sampai ketempat tujuan. Untuk itu manusia memerlukan peraturan dan undang-undang yaitu agama yang dapat dijadikan petunjuk dan tuntutan di dalam kehidupan manusia.

Penduduk Kecamatan Bangkinang Seberang mayoritas beragama Islam, hanya sebagian kecil saja yang beragama Kristen, Katolik dan Hindu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL IV
KLASIFIKASI PENDUDUK KECAMATAN BANGKINANG
SEBERANG MENURUT AGAMA DAN KEPERCAYAANNYA

NO	DESA/KEL	PENDUDUK MENURUT AGAMA			
		ISLAM	KRISTEN	KATOLIK	HINDU
1	Pulau Lawas	2.901	-	-	-
2	Muara Uwai	3.511	-	-	-
3	Pulau	3.078	-	-	-
4	Pasir Sialang	7.188	-	-	-
5	Bkt Sembilan	1.604	-	-	-
6	Laboi Jaya	2.606	48	-	-
7	Suku Mulya	2.299	74	-	-
8	Bukit Payung	2.284	97	79	34
9	Binuang	1.707	-	-	-
JUMLAH		27.178	831	313	34

Sumber data : Monografi Kecamatan Bangkinang Seberang

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Islam adalah agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Kecamatan Bangkinang Seberang yaitu sebanyak 27.178 orang (95%).

Penduduk Kecamatan Bangkinang Seberang mayoritas beragama Islam, kehidupan keagamaan berkembang dengan baik dan mengalami peningkatan diberbagai bidang. Hal ini terbukti dengan terdapatnya sejumlah rumah ibadah. Rumah ibadah tersebut selain digunakan untuk kegiatan ibadah, juga dimanfaatkan sebagai tempat belajar Al-Qur'an dan wirid pengajian serta kegiatan agama lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL V
JUMLAH TEMPAT IBADAH DI KECAMATAN BANGKINANG
SEBERANG TAHUN 2009/2010

NO	DESA/KEL	RUMAH IBADAH			
		MASJID	SURAU	GEREJA	PURA
1	Pulau Lawas	3	5	-	-
2	Muara Uwai	5	6	-	-
3	Pulau	3	6	-	-
4	Pasir Sialang	7	2	-	-
5	Bkt Sembilan	2	4	-	-
6	Laboi Jaya	3	4	-	-
7	Suku Mulya	3	5	1	-
8	Bukit Payung	2	6	-	-
9	Binuang	1	1	-	-
JUMLAH		29	39	1	-

Sumber data : kantor Camat Bangkinang Seberang

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa masjid dan surau lebih banyak didirikan di setiap desa/kelurahan yaitu 29 buah masjid dan 39 buah surau. Sedangkan gereja hanya 1 buah yang terdapat di Desa Suka Mulya yang sampai saat ini belum memiliki izin dan pengajian yang diadakan oleh jemaatnya secara tertutup dan agak jauh dari pemukiman penduduk.

C. Pendidikan

Penduduk Kecamatan Bangkinang Seberang pada umumnya sudah mengerti akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka sehingga anak-anak yang berada dalam usia sekolah rata-rata sudah mengecap pendidikan di sekolah negeri maupun swasta.

Penduduk Kecamatan Bangkinang Seberang yang berjumlah 28.356 Jiwa sebagian besar berpendidikan tamat SD, SLTP, SLTA dan sebagian kecil saja yang sampai keperguruan tinggi. Untuk lebih jelasnya tingkat pendidikan penduduk Kecamatan Bangkinang Seberang dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL VI
KLASIFIKASI PENDUDUK KECAMATAN BANGKINANG
SEBERANG MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	Tidak Sekolah	2.836	10 %
2	TK	567	2 %
3	SD	18.431	65 %
4	SLTP	1.985	7 %
5	SLTA	3.119	11 %
6	Perguruan Tinggi	1.418	5 %
	JUMLAH	28.356	100 %

Sumber data : Monografi Kecamatan Bangkinang Seberang tahun 2009/2010.

Dari tabel di atas dapat kita ketahui generasi yang tergolong berpendidikan di Kecamatan Bangkinang Seberang lebih kurang 24.953 orang atau sekitar 87,99%, dan jumlah penduduk yang belum dapat menamatkan pendidikan, yaitu sekitar 2% dan belum sekolah masih cukup besar mencapai 2.836 orang atau sekitar 10%

Untuk melaksanakan wajib belajar, pemerintah telah mengadakan dan mendirikan sarana dan prasarana pendidikan seperti gedung sekolah, mendatangkan guru, serta buku-buku bacaan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL VII
PRASARANA PENDIDIKAN UMUM (NEGERI) DI KECAMATAN
BANGKINANG SEBERANG

NO	PRASARANA	JUMLAH
1	PLAY GRUP	8
2	TK	8
3	SD	22
4	SDLB	1
5	SLTP	4
6	SLTA	1

Sumber data : Monografi Kecamatan Bankinang Seberang.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sarana dan fasilitas umum yang ada di Kecamatan Bangkinang Seberang terdapat 8 unit Play Group, 8 unit Taman Kanak-Kanak, 22 unit Sekolah dasar, 1 unit SDLB, 4 unit SLTP, dan 1 unit SLTA.

Disamping pendidikan umum, terdapat pula sekolah pendidikan agama yaitu :

TABEL VIII
PRASARANA PADA SEKOLAH PENDIDIKAN AGAMA
BANGKINANG SEBERANG

NO	PRASARANA	JUMLAH
1	MDA	7
2	MTS	4
3	MAS	2
4	PASANTREN	2

Sumber data : Monografi Kecamatan Bangkinang Seberang

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sarana dan fasilitas pendidikan agama (swasta) yang ada di Kecamatan Bangkinang Seberang terdapat 7 unit MDA, 4 unit MTS, 2 unit MAS, serta 2 unit Pesantren

Dilihat dari jumlah penduduk yang ada di Kecamatan Bangkinang Seberang ini, banyaknya sarana pendidikan belum menampung anak-anak yang ingin melanjutkan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi. Dengan keterbatasan prasarana yang ada maka sebagian besar anak yang lulus sekolah menengah atas melanjutkan pendidikannya ketempat lain atau kota lain, seperti Kota Pekanbaru, Padang, dll.

D. Adat Istiadat dan Sosial Budaya

Indonesia terkenal dengan keanekaragaman suku bangsa, bahasa, adat istiadat dan kebudayaan. Begitu juga halnya Kecamatan Bangkinang Seberang yang terdiri dari berbagai suku, seperti : Suku Melayu, Mandeliong, Domo, Piliang, Batak, Minang, dll. Walaupun berbeda suku, namun dalam kehidupan sehari-hari mereka hidup rukun dan damai tanpa ada perpecahan antara satu dengan lainnya.

Sistem kekerabatan atau kekeluargaan di Kecamatan Bangkinang Seberang adalah berdasarkan garis keturunan ibu (Matrilineal), sehingga setiap anak dan kemenakan lebih dekat dan akrab dengan ibu dan saudara ibu serta kerabat dari pihak ibu. Begitu juga pola persukuan anak yaitu mengikuti suku ibunya.

Kecamatan Bangkinang Seberang terdapat berbagai macam tradisi yang melekat pada masyarakat diantaranya, yaitu:³

1. Hari raya enam yang juga disebut Ziarah Kubur

Tradisi ziarah kubur biasanya dilakukan sebagian masyarakat Kabupaten Kampar, pada bulan Syawal setelah puasa enam. Dalam tradisi ziarah kubur ini masyarakat berbondong-bondong khususnya kaum laki-laki datang ke kuburan dalam rangka membacakan do'a untuk arwah-arwah kaum muslimin yang telah berpulang kerahmatullah, selanjutnya pada waktu tengah hari diadakan makan *Baselo* secara bersama di surau atau di masjid yang mana hidangannya telah disediakan

³ Sumber Data : Kantor Camat Bangkinang Seberang

oleh kaum ibu-ibu dari setiap rumah. Demikian juga halnya dengan masyarakat Kecamatan Bangkinang Seberang yang melakukan hari raya enam dan ziarah kubur.

2. Upacara kematian

Apabila ada warga yang meninggal dunia, maka warga yang lainnya berbondong-bondong untuk berta'ziah dengan membawa beras dan secerek air yang digunakan untuk keperluan mengurus jenazah. Setelah tujuh hari berselang, masyarakat kembali diundang untuk mendoa'akan si mayat, demikian juga untuk 14 hari bahkan sampai 100 hari kematian.

3. Balimau kasai

Tradisi balimau kasai dilakukan dalam rangka ikut bersuka cita ketika menyambut datangnya bulan suci Ramadhan, dimana tradisi ini hampir terdapat pada sebagian besar masyarakat di wilayah daerah Kabupaten Kampar.

Dalam tradisi ini biasanya masyarakat berbondong-bondong menuju tempat yang telah ditentukan yang diiringi dengan dzikir disertai dengan sampan hias yang memadati sungai Kampar. Tradisi ini merupakan tradisi yang paling ramai pengunjungnya, jika dibandingkan dengan tradisi-tradisi lainnya yang ada di daerah ini.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG NAFKAH

A. Pengertian Nafkah

Nafkah berasal dari bahasa Arab *an-Nafaqah* yang berarti pengeluaran, pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang yang menjadi tanggungjawabnya.¹ Nafkah juga berarti belanja, kebutuhan pokok yang dimaksudkan adalah kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkannya.² Sebagian ahli fiqh berpendapat bahwa yang termasuk dalam kebutuhan pokok itu adalah pangan, sandang, tempat tinggal Sementara ahli fiqh yang lain berpendapat bahwa kebutuhan pokok itu hanyalah pangan. Mengingat banyaknya kebutuhan yang diperlukan oleh keluarga tersebut maka dari pendapat tersebut dapat dipahami bahwa kebutuhan pokok minimal adalah pangan, sedangkan kebutuhan yang lain tergantung kemampuan orang yang berkewajiban membayar atau menyediakannya dan memenuhinya.³

Ulama fiqh sepakat bahwa nafkah minimal harus dikeluarkan adalah yang dapat memnuhi kebutuhan pokok, yakni makanan, pakaian dan tempat tinggal. Untuk kebutuhan yang terakhir ini, menurut ulama fiqh, tidak harus

¹ Iman Jauhari , *Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam*, Pustaka Bangsa Press, Jakarta,2003, hal.84.

² Safuddin Mujtaba dalam Iman Jauhari,*Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam*,Pustaka Bangsa Press, Jakarta, hal. 84.

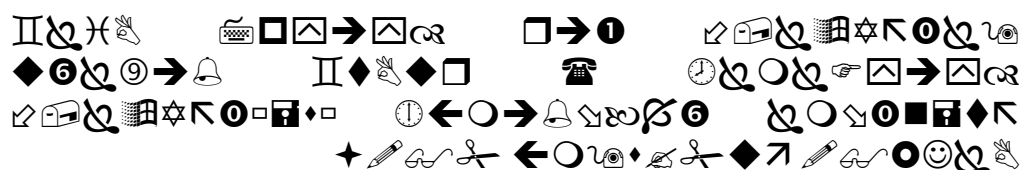
³ *Ibid*, hal. 88

milik sendiri, melainkan boleh dalam kontrakan, apabila tidak mampu memiliki sendiri.⁴

B. Pembagian Nafkah

Para ulama membagi nafkah atas dua macam, pertama, nafkah diri sendiri, dalam hal ini, seseorang harus mendahulukan nafkah untuk dirinya sendiri sesuai dengan sabda Rasulullah saw: *Mulailah dengan diri engkau, kemudian bagi orang yang berada di bawah tanggung jawabmu* (HR. Muslim). Dalam hadis lain yang diriwayatkan Ahma bin Hanbal, *Mulailah dengan diri engkau, kemudian bersekehlah atas harta itu*, kedua, nafkah seseorang kepada orang lain. Kewajiban nafkah kepada orang lain, menurut kesepakatan ulama, terjadi disebabkan tiga hal: a, hubungan perkawinan, b, hubungan kekerabatan, dan c, hubungan kepemilikan (tuan terhadap hambanya).⁵

Apabila berlangsung suatu perkawinan dengan memnuhi persyaratan dan rukunnya, suami wajib member nafkah atas istrinya. Alasannya adalah firman Allah swt dalam al-Qur'an yang berbunyi



Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut

kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah

⁴ Abdul Aziz Dahlan (editor), *ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Van Hove, jild 4, 2000, hal. 1281.

⁵ *Ibid*,

member nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. (Q.S. at-Tholaaq: 7).

Terdapat perbedaan pendapat ulama dalam menentukan **syarat** wajib nafkah bagi istri, menurut jumhur ulama, suami wajib memberi nafkah bagi istrinya apabila,

1. Istri menyerahkan dirinya kepada suaminya, sekalipun belum dilakukan hubungan badan
2. Istri tersebut adalah orang dewasa, dalam arti telah layak melakukan hubungan badan, apabila istri masih kecil sehingga belum disenggamai, maka tidak ada nafkah baginya karena kewajiban nafkah itu muncul dari dimungkinkannya hubungan suami-istri.
3. Perkawinan suami-istri memenuhi rukun dan syarat, apabila perkawinan mereka termasuk perkawinan yang fasid, menurut jumhur ulama, tidak wajib nafkah karena nikah fasid harus dibatalkan
4. Istri taat dan patuh pada suaminya, apabila istri itu tidak patuh dan taat seperti istri yang nusyuz, maka suami tidak wajib membayar nafkahnya. Apabila nusyuz itu dari suami, maka istri tetap berhak mendapatkan nafkah dari suaminya.⁶

Sedangkan dalam skala negara dan bangsa sebagaimana telah disinggung terdahulu, anak adalah merupakan aset bangsa yang tidak ternilai harganya yang dapat dijadikan sebagai salah satu indikator utama (*leading indicator*) ekonomi suatu bangsa. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang

⁶ Satria Effendi M.Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Jakarta: Prenada Media 2004) hal.145

Perkawinan dan Intruksi Presiden No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam mengatur dengan tegas kewajiban orang tua terhadap anak. Dengan demikian, suami isrti memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Hak maupun kewajiban orang tua terhadap anak dalam hukum dikenal dengan istilah salah teknis hukum sebagai “kekuasaan orang tua” (*ouderlijkemacht*). Kekuasaan orang tua ini penting artinya bagi kehidupan seorang anak terutama yang belum dewasa karena melalui lembaga hukum ini hak-hak dasar anak akan dipenuhi⁷.

Dalam Keluarga yang orangtua bercerai pertumbuhan anak dalam standar yang ideal kemungkinan sulit tercapai karena kebutuhan jasmani dan rohaninya tidak dapat dipenuhi secara sempurna. Apabila dikaitkan pula dengan kebutuhan materi/jasmani anak yang hidup dalam keluarga yang kedua orang tuanya sudah bercerai, pertumbuhan dan perkembangan anak tentu akan mengalami hambatan yang serius apabila kebutuhan materi/jasmani anak berupa biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan anak sampai dewasa tidak ada kejelasannya. Dalam simposium aspek-aspek hukum masalah perlindungan anak dilihat dari segi pembinaan generasi muda yang diselenggarakan BPHN telah dicatat beberapa kesepakatan antara lain bahwa konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas semua hak

⁷ Irma Setyowati Soemitro, *Kekuasaan Orang Tua Setelah Perceraian (Suatu Penelitian Di Desa Cukil, Sruwen dan Sugihan Kecamatan Tenganan*, Dalam Majalah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1994, hal. 37.

serta kepentingan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial, melainkan perlindungan anak juga menyangkut aspek pembinaan generasi muda⁸.

Secara garis besar maka dapat disebutkan bahwa perlindungan anak dapat dibedakan dalam dua pengertian, yaitu :

- b. Perlindungan yang bersifat yuridis yang meliputi :
 - bidang hukum publik
 - bidang hukum keperdataan
- c. Perlindungan yang bersifat non yuridis yang meliputi :
 - bidang sosial
 - bidang kesehatan
 - bidang pendidikan.⁹

Menyadari demikian pentingnya anak dalam kedudukan keluarga, individu, masyarakat, bangsa dan negara maka undangundang telah mengatur hak-hak anak misalnya dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang No. 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, dan Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan berbagai peraturan perundangundangan lain. Demikian pula hak-hak anak diakui oleh sejumlah putusan pengadilan.

Di samping hak-hak anak memperoleh pengakuan dalam peraturan perundang-undangan nasional, hak-hak anak juga memperoleh pengakuan

⁸ Aminah Azis, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, USU Press, Medan, 1998, hal. 26.

⁹ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hal. 13.

dalam peraturan perundang-undangan nasional, maupun secara internasional. Hal tersebut terlihat dalam berbagai konvensi-konvensi internasional yang memfokuskan perhatiannya terhadap persoalan anak seperti misalnya *Convention on The Rights of Child Tahun 1989*, *ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Amediate Action for The Worst Forms of the Child Labour* tahun 1999 dan lain sebagainya.

Namun meskipun telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan adanya kecenderungan internasional yang memfokuskan perhatian terhadap anak, pada kenyataannya masih banyak anak yang tidak beruntung (*disadvantaged children*) dalam mencukupi kehidupannya. Sebagai salah satu faktor ketidakberuntungan anak dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya baik dilihat dari aspek rohani maupun aspek jasmani berupa pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dan pendidikan yang layak bagi anak adalah akibat adanya perceraian kedua orang tuanya. Baik Undang-Undang No.1 Tahun 974 maupun Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lainnya yang dijadikan hukum materil oleh pengadilan agama dalam memutus perkara-perkara perceraian dalam pasal-pasalnya dengan tegas mengatur tentang kewajiban orang tua terhadap biaya nafkah anak setelah terjadinya perceraian yang pada hakikatnya membebankan kewajiban itu kepada orang tua laki-laki (ayah).

Mazhab Maliki membedakan syarat wajib nafkah istri setelah disenggamai dengan sebelum disenggamai. Syarat nafkah sebelum istri disesenggamai adalah sebagai berikut:

1. Punya kemungkinan untuk disenggamai, apabila suami mengajak istri untuk melakukan hubungan suami-istri namun istrinya menolak, maka ia tidak berhak menerima nafkah
2. Istri layak untuk disenggamai, apabila istri belum layak untuk disenggamai, seperti masih kecil, maka ia tidak berhak menerima nafkah
3. Suami itu adalah seseorang yang telah balig, jika suami belum balig sehingga belum mampu melakukan hubungan suami-istri secara sempurna, maka ia tidak wajib membayar nafkah. Selanjutnya, syarat wajibnya nafkah bagi istri yang disenggamai
 - a. Suami itu mampu, maka selama ia tidak mampu tidak wajib membayar nafkah bagi istrinya
 - b. Istri tersebut tidak bersikap nusyuz terhadap suaminya, apabila suami yang bersikap nusyuz, maka ia tetap berkewajiban membayar nafkah bagi istrinya.¹⁰

Mengenai jumlah nafkah yang harus dibayarkan suami kepada istrinya, terdapat pendapat ulama dalam menetapkan jumlah nafkah yang wajib diberikan suami terhadap istrinya, menurut jumhur ulama, menetapkan bahwa jumlah nafkah itu diberikan secukupnya, mereka tidak mengemukakan jumlah pasti dalam penentuan nafkah tersebut, tetapi hanya menetapkan sesuai dengan

¹⁰ *Ibid*

kemampuan suami, lainnya halnya dengan pendapat mazhab Al-Syafi'I, menurut mereka, nafkah berupa makanan yang wajib diberikan suami kepada istrinya ditentukan sejalan dengan kemampuan suami, jumlah nafkah minimal yang harus dibayarkan suami, sama dengan jumlah kafarat sumpah yang dibayarkan pada satu orang, yaitu satu *mudd* (675 gram gandum), mazhab Syafi'I menetapkan, bahwa setiap hari, suami yang mampu, wajib membayar nafkah sebanyak 1.350 gram gandum (beras), dan suami yang tidak mampu wajib membayarkan sebanyak 675 gram gandum (beras).¹¹

Adapun yang berkaitan dengan pakaian, ulama sepakat menyatakan bahwa hal itu tergantung dari kemampuan suami karena tidak ada nash (ayat maupun hadis) yang menentukan kadar dan jumlahnya, demikian juga halnya yang berhubungan dengan tempat tinggal, suami juga berkewajiban menyediakannya dengan membeli sendiri, menyewa, meminjam atau didapatkan melalui wakaf.¹²

Tentang nafkah anak, ulama sepakat menyatakan bahwa ayah berkewajiban membayarkan nafkah anak-anaknya. Jumhur ulama berpendapat sepakat menyatakan bahwa anak-anak berhak menerima nafkah dari ayahnya apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Apabila ayah mampu memberikan untuk nafkah mereka atau paling tidak mampu untuk bekerja mencari rezeki. Apabila ayah tidak mampu, baik karena memang tidak punya harta maupun

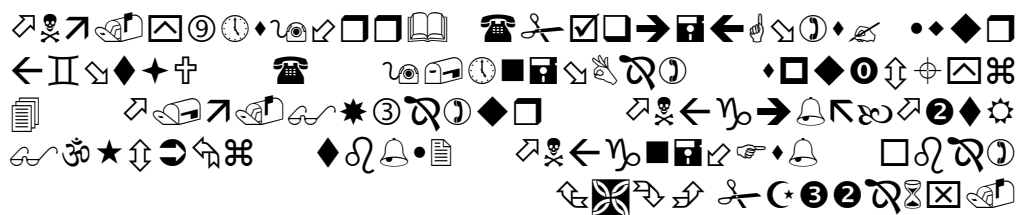
¹¹ Aziz Dahlan, *Op Cit*, h.1282

¹² *Ibid*

tidak mampu bekerja mencari nafkah, maka ia tidak wajib membayar nafkah anak-anaknya.

2. Anak itu tidak memiliki harta sendiri dan tidak atau belum mampu mencari nafkah sendiri. Apabila anak itu memiliki nafkah atau pekerjaan tetap, maka ayahnya tidak wajib membrinya nafkah
3. Menurut Mazhab Hanbali, antara ayah dan anak tidak berbeda agama, akan tetapi menurut jumhur ulama, perbedaaan agama ayah dan anak tidak menghalangi kewajiban ayah menafkahi anaknya.¹³

Dalam pandangan Islam anak adalah titipan Allah SWT Kepada orang tua, masyarakat, bangsa, negara sebagai pewaris dari ajaran islam, Pengertian ini memberikan hak atau melahirkan hak yang harus diakui, diyakini dan diamankan.¹⁴ Ketentuan ini ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra (17) ayat 31 yang berbunyi :



Artinya :Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut

kemiskinan. Inilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu, sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang amat besar.

¹³ Chuzaimah Tahido Yanggo, *Fiqih Anak*, Jakarta: Rosda, 2005, hal. 45

¹⁴ 28 M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Zahir Trading Co, Medan, 1975, hal. 123.

Dalam yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, tidak ada keseragaman mengenai batas kedewasaan, Sebagai gambaran dalam putusan Mahkamah Agung No. 53 K/sip/152 tanggal 1 Juni 1955 dinyatakan bahwa 15 tahun dianggap telah dewasa untuk kasus yang terjadi di wilayah Bali Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor : 601 K/SIP/1976, dinyatakan bahwa tanggal 18 November 1976 umur 20 tahun dianggap telah dewasa untuk perkara yang terjadi di daerah Jakarta

Pada dasarnya tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi beban orang tuanya, baik kedua orang tuanya masih hidup rukun atau ketika perkawinan mereka gagal karena perceraian. Apabila dalam perkawinan telah di lahirkan anak, maka perceraian juga membawa hukum terhadap anak, yaitu orang tua tidak dapat memelihara anak secara bersama-sama lagi. Untuk itu pemeliharaan anak diserahkan kepada salah satu orang tua. Berkaitan dengan masalah pemeliharaan anak setelah perceraian, di dalam pasal 41 Undang-undang No. 1 Th.1974 terdapat ketentuan yang mengatur hal ini.

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberikan putusannya.
2. Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang di perlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.¹⁵

Muhammad Yahya Harahap menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemeliharaan anak adalah :

1. Tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberikan pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup anak.
2. Pemeliharaan yang berupa pengawasan, pelayanan serta pencukupan nafkah anak tersebut adalah bersifat kontinyu (terus menerus) sampai anak itu dewasa.¹⁶

Pasal 9 UU No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara fisik, jasmani maupun sosial.

Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 mengenai ketentuan-ketentuan dalam kompilasi hukum Islam yang mengatur tentang kewajiban orang tua terhadap anak. Dalam Pasal 77 Instruksi Presiden RI No. 1 tahun 1991 tentang kompilasi Hukum Islam disebutkan : Ayat (1) : Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Ayat (2) : Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani

¹⁵ Ahmad Rofiq, MA. *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta 2003, h 248

¹⁶ Bagong Suyanto, *Krisis Ekonomi Pemenuhan dan Penegakan Hak-hak Anak, Tinjauan Terhadap Kebijakan Pemerintah dan Implementasinya dalam Penegakan Hak Asasi Anak Di Indonesia*, USU Press, medan, 1999, hal. 45.

maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya. Dalam Pasal 80 ayat 4 Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ditegaskan pula bahwa suami menanggung biaya rumah tangga biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak sesuai dengan kemampuan penghasilannya selanjutnya, Dalam pasal 81 ditegaskan bahwa suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anak dalam Pasal 98 tentang pemeliharaan anak, ditegaskan pula bahwa :

1. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
2. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam maupun di luar pengadilan.
3. Pengadilan agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

C. Pengertian Kadaluwarsa (Taqadum) Nafkah

At-Taqadum secara harfiah berarti berlalunya waktu tertentu, atau kadaluwarsa.¹⁷ Istilah taqadum pertama kali dikenal dan dijumpai dalam literature fiqh mazhab hanafi, yaitu ketika membahas persoalan tindak pidana, sedangkan jumhur ulama tidak menerima konsep taqadum baik dalam pembuktian maupun dalam pelaksanaan suatu hukuman dalam bidang pidana. Adapun dalam bidang perdata atau muamalah, para ulama

¹⁷ A. Aziz Dahlan, *Op Cit*, Jilid 5, hal. 1793

jumhur sepakat termasuk mazhab Hanafi sepakat menyatakan bahwa taqadum tidak berlaku dan tidak dapat diterima.¹⁸

Berdasarkan pengertian di atas, ulama mazhab Hanafi membagi taqadum kepada dua bentuk, yaitu taqadum dalam pembuktian suatu tindak pidana dan taqadum dalam pelaksanaan hukuman yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Taqadum dalam pembuktian suatu tindak pidana. Dalam kasus seperti ini ulama mazhab Hanafi membedakannya antara tindak pidana yang dibuktikan melalui saksi dan tindak pidana yang dibuktikan dengan pengakuan. Apabila suatu tindak pidana dibuktikan dengan alat bukti kesaksian, maka kesaksian itu ditolak. Artinya, tindak pidana yang telah mengalami taqadum tidak bias dibuktikan dengan kesaksian, alasan mereka adalah bahwa persaksian terhadap tindak pidana yang telah mengalami taqadum mengandung cacat dalam pembuktian, yaitu ada dugaan bahwa kesaksian itu adalah palsu atau kesaksian itu mengandung unsure subjektivitas dari pihak saksi. Unsur subjektivitas yang dimaksud adalah bisa karena hubungan kekerabatan, dan sikap dendam dari saksi, sehingga menurut mazhab ini, kesaksian itu tidak dapat diterima¹⁹.

Apabila tindak pidana yang telah mengalami taqadum itu dibuktikan dengan pengakuan oleh yang melakukannya, maka tindak pidana itu bisa diproses dan dibuktikan, kecuali apabila tindak pidana yang dilakukan itu adalah tindak pidana meminum minuman keras, pengakuan pun juga tidak bias diterima jika telah mengalami taqadum, alasannya adalah dalam membedakan

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid., hal.1793*

tindak pidana meminum minuman keras dengan tindak pidana lainnya adalah karena kesaksian dan pengakuan terhadap tindak pidana meminum minuman keras harus dibuktikan juga dengan mencium bau minuman keras itu dari nafas mereka. Apabila tindak pidana ini mengalami taqadum, maka pembuktian melalui bau minuman keras ini tidak bisa lagi, oleh sebab itu, kesaksian dan pengakuan yang mengalami taqadum dalam tindak pidana meminum minuman keras tidak dapat diterima.²⁰

Dalam konteks kadaluwarsa (taqadum) nafkah adalah seorang suami yang menunggak memberikan nafkah kepada istri dan anaknya, kemudian istri dan anak menuntut kepada suami, agar suami membayar nafkah pada bulan-bulan sebelumnya.²¹

²⁰ *Ibid*

²¹ Satria Efendi, *Op Cit*, hal. 160

BAB IV
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN
NAFKAH KADALUWARSA

A. Efektifitas Penyelesaian Nafkah Kadaluwarsa di Kecamatan Bangkinang Seberang

Adanya kelalaian untuk memberikan nafkah sehingga pihak yang wajib dinafkahinya menjadi terlantar, merupakan permasalahan yang sering terjadi di kalangan masyarakat Islam, termasuk juga yang terjadi di Kecamatan Bangkinang Seberang. Kenyataan seperti tersebut sering terjadi terutama dalam masyarakat yang kurang pengetahuannya tentang bagaimana cara memperoleh suatu hak. Dalam masyarakat seperti itu pihak yang terlantarkan haknya hanya menyerahkan nasibnya kepada rasa kasihan pihak yang mempunyai kewajiban. Akibatnya, tidak sedikit anak yang terlantar dibiarkan begitu saja oleh ayahnya tanpa ada pembelaan. Kalaupun ada upaya pembelaan haknya melalui badan penegak hukum, namun hanya terkonsentrasi pada pengembalian hak yang terzalimi, tanpa mempertimbangkan unsure kejahatan yang telah dilakukan oleh pihak yang melalaikan kewajibannya itu. Kelalaian seseorang untuk memberikan nafkah kepada pihak yang wajib dinafkahinya adalah suatu kejahatan apabila kelalaiannya itu telah menimbulkan madarat pada diri orang yang wajib dinafkahinya.

Contoh kasus seorang ayah yang bernama Zainuddin telah melalaikan kewajibannya dengan tidak lagi member nafkah kepada istri dan 4 orang anaknya. Atas kelainannya ini Siti Rohani, sebagai ibu dari empat anak-anaknya mengajukan pendapat ke tokoh-tokoh agama setempat di Kecamatan Bangkinang Seberang dengan harapan agar Zainudiin membayar nafkah ke 4 orang anak-anaknya yang telah dilahirkan selama 2 tahun.

Pengaduan Siti Rohani ini kemudian dibicarakan dan dimusyawarahkan oleh tokoh-tokoh agama Kecamatan Bangkinang Seberang dengan mengundang dari pihak kelaurga suami dan pihak keluarga istri, hasil dari musyawarah tersebut dicapai suatu kesepakatan bahwa pihak keluarga suami berjanji untuk membayar kewajiban nafkah bagi istri dan ana-anaknya yang sudah diterlantarkan selama dua tahun.

Pertanyaan yang muncul adalah kenapa penyelesaian kadaluwarsa (taqadum) nafkah tidak diselesaikan di Pengadilan Agama dengan mengajukan gugatan tuntutan taqadum nafkah nafkah?. Ternyata jawabannya atas hasil musyawarah para alim ulama dan tokoh masyarakat bahwa sanya dengan mengacu kepada pasal 40 ayat a, b dan c Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan tidak ada kadaluwarsa atau taqadum atau nafkah madhiyah untuk anak dan istri. Lebih lengkap pasal tersebut berbunyi:

- a) Nafkah anak merupakan kewajiban ayah, dalam keadaan ayah tidak mampu, ibu berkewajiban member nafkah anak. Oleh karena nafkah anak merupakan kewajiban ayah dan ibu, maka nafkah kadalauwarsa atau

lampau anak tidak dapat dituntut oleh istri sebagai hutang suami. Tegasnya tidak ada nafkah madhiyah untuk anak.

- b) Pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani dan kecerdasan intelektual dan agamanya. Oleh karenanya ibu lebih layak dan lebih berhak untuk memelihara anak di bawah usia 12 tahun.
- c) Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan kepada ayahnya, bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak.
- d) Pengalihan pemeliharaan anak tersebut dalam huruf c di atas, harus didasarkan atas putusan pengadilan agama dengan mengajukan permohonan pencabutan kekuasaan orang tua, jika anak tersebut oleh pengadilan agama telah ditetapkan di bawah asuhan istri.
- e) Pencabutan kekuasaan orang tua dapat diajukan oleh orang tua yang lain, anak, keluarga, dalam garis lurus ke atas, saudara kandung dan pejabat berwenang (jaksa).
- f) Untuk keseragaman, amar putusan permohonan pemeliharaan anak berbunyi:

“Menetapkan anak..... bin? binti..... umur..... tahun/tanggal lahir..... Berada dibawah hadhonah.....”
- g) Dalam hal hadhonah dimintakan pencabutan ke Pengadilan Agama, maka amarnya berbunyi:

1. Mencabut hak hadhonah dari termohon (nama..... Binti.....)
2. Menetapkan anak bernama..... bin/binti..... berada di bawah hadhonah pemohon (nama.....bin/binti.....)¹

Dengan mengacu kepada undang-undang dan pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan agama, maka para tokoh alim ulama Kecamatan Bangkinang Seberang, khusus dalam menyelesaikan masalah kadaluwarsa nafkah diselesaikan secara musyawarah dan tidak diselesaikan di pengadilan agama, karena pengadilan agama sesuai dengan bunyi undang-undang dan pasal di atas, pengadilan agama tidak dapat menerima gugatan nafkah kadaluwarsa atau nafkah madhiyah.

B. Faktor-Faktor yang Menjadi Hambatan dalam Penyelesaian Nafkah Kadaluwarsa (Taqadum) di Kecamatan Bangkinang Seberang.

Ada beberapa factor yang menjadi hambatan dalam penyelesaian kadaluwarsa nafkah:

Suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya disebabkan oleh dua hal:

- a. Suami tidak memberikan nafkah kepada istri karena si suami dalam kesulitan

Ulama sepakat, tidak boleh memenjarakan suami dalam keadaan sempit yang tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya ia diberi waktu sampai lapang, dengan alasan ayat al-Quran yang menegaskan bahwa jika seseorang dalam keadaan kesulitan , maka diberi waktu

¹ Pedoman Teknis Administrasi dan teknis Peradilan Agama, Buku II, edisi 2009, Mahakamah Agung, Jakarta, h.231

[illegible]

b. Suami enggan memberikan nafkah kepada isterinya padahal ia berada dalam keadaan lapang dari segi ekonomi

Dalam hal ini menurut kalangan Hanafiah, Hakim dipengadilan berhak menyita harta suami secara paksa dan harganya diserahkan untuk pembiayaan istri. Jika ia menyembunyikan kekayaannya, hakim

berhak menghukumnya dengan penjara bila dikehendaki oleh istri sampai ia bersedia menunaikan kewajibannya, alasannya hadis riwayat Abu Hurairah yang menceritakan ketegasan Rasulullah bahwa keengganan seseorang yang mampu menunaikan kewajibannya adalah suatu kezaliman, oleh karena itu boleh dikenakan hukuman dan dipenjarakan sampai ia bersedia menunaikan kewajibannya.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nafkah Kadaluwarsa

Pembicaraan tentang nafkah dalam buku-buku Fiqh disajikan secara komprehensif sebagai bagian dari kajian fiqh keluarga. Penejelsannya diuraikan secara rinci dimulai dari pengertian nafkah. Siapa yang wajib dinafkahi, berapa kadarnya, dan siapa yang wajib menafkahnya, sampai kepada penjelasan tentang sangsi hukum yang diancamkan atas siapa saja yang melalikan kewajiban tersebut. Dengan demikian secara teoritis, hukum nafkah seperti diuraikan dalam buku-buku fiqh selain dianggap mampu memberikan jaminan terhadap kebutuhan pihak-pihak yang berhak untuk memperoleh nafkah, juga dianggap mampu mengatasinya akibat negative dari kemungkinan adanya pihak-pihak yang melalaikan tanggung jawabnya.

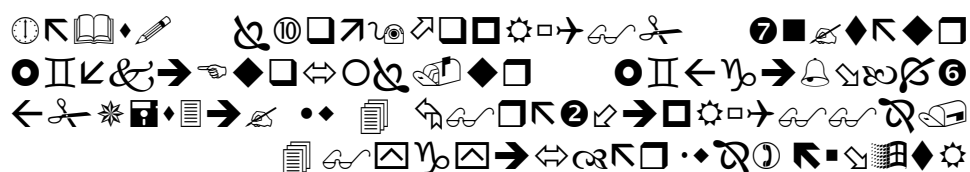
Dalam hukum Islam, seseorang bertanggung jawab terhadap segala perbuatannya yang telah mengakibatkan madarat atas diri atau harta orang lain. Salah satu dari lima kaidah pokok fiqh mengatakan, bahwa: Kemudhorotan itu wajib disingkirkan, Maksudnya, setiap hal yang menimbulkan kemudorotan baik terhadap diri maupun orang lain, wajib diantisipasi agar jangan terjadi. Di antara upaya mengantisipasinya adalah

adanya kewajiban mengganti rugi atas pihak yang melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan orang lain menderita kerugian materi. Seorang ayah yang telah lalai dan menelantarkan anak kandungannya dengan tidak memberinya nafkah, dan atas perbuatannya tersebut, anak kandungannya menjadi tersiksa fisik atau jiwanya, maka ayahnya itu di samping dituntut untuk mengganti rugi nafkah anak, juga diancam dengan hukuman ta'zir.²

Untuk mengatur sanksi hukuman ta'zir seperti dikemukakan di atas, pihak penguasa perlu mempungsikan bidang ilmu siyash syar'iyah. Siyash Syar'iyah adalah seperangkat kebijaksanaan dan peraturan yang dirumuskan oleh penguasa dalam rangka menunjang berlakunya ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Kebijaksanaan dan peraturan itu dapat dirumuskan sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Meskipun tidak terdapat rumusannya dalam buku-buku fiqh.

1. Kewajiban Nafkah bagi Istri

Dalam kajian hukum Islam, akad nikah yang sah menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Di antaranya, pihak istri berhak untuk mendapatkan nafkah dari pihak suami yang menikahinya. Sebaliknya, di atas pundak suami terletak kewajiban untuk menafkahi istrinya. Banyak ayat dan hadis Rasulullah yang menunjukkan hal tersebut, di antaranya ayat 233 surat al-Baqarah yang berbunyi :



² Satria Effendi, *op cit*, hal.145.

Artinya: Dan kewajiban ayah memberi makanan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuan dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. (QS. Al-Baqarah: 233)

Ayat tersebut memerintahkan kepada pihak suami untuk memberikan jaminan nafkah kepada isterinya. Ada tiga macam nafkah yang ditegaskan dalam ayat tersebut, yaitu: Makanan, pakaian dan tempat tinggal

Ayat al-Quran tersebut dianggap cukup untuk meyakinkan adanya kewajiban nafkah atas diri suami untuk istrinya. Meskipun demikian, sesuai dengan sifatnya ayat dan hadis tersebut tidak merinci landasan filosofis mengapa timbul kewajiban tersebut. Dalam hal-hal yang tidak rinci dalam al-Quran maupun Sunnah Rasulullah, akal pikiran mempunyai peranan untuk menelitinya. Sebagai kesimpulan akal pikiran, terbuka untuk berbeda pendapat, karena sangat tergantung kepada perbedaan sisi tempat melihat permasalahan. Maka dalam hal ini seperti yang dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili dalam karyanya al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, para ulama fiqh masa silam berbeda pendapat.

- a. Kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa yang menjadi alasan mengapa seorang suami diwajibkan menafkahi istrinya sebagai imbalan dari hak suami untuk membatasi gerak-gerik si istri, dan pihak istri memberikan loyalitasnya kepada ketentuan suami. Begitu

akad nikah diucapkan secara sah kebebasan seorang istri menjadi terbatas oleh beberapa ketentuan sebagai seorang istri. Istri tidak lagi diperbolehkan secara bebas bepergian kemana-mana atau melakukan suatu kebijakan kecuali dengan lebih dahulu berkonsultasi dengan pihak suami.

Di samping itu, istri berkewajiban untuk memberikan loyalitasnya kepada suami sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam hukum Islam. Istri wajib secara rela menyerahkan dirinya kepada suami untuk membatasi keleluasaan dan untuk mendapatkan loyalitas dari istri diperolehnya dari adanya akad nikah yang sah. Hak suami untuk membatasi kewenangan istri, merupakan konsekuensi dari kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga, dan kewajiban istri untuk memberikan loyalitas adalah konsekuensi dari kedudukannya sebagai istri. Atas dasar itu pihak istri berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Sayid sabiq dalam bukunya menyebutkan, bahwa setiap orang yang dibatasi kewenangannya dan diambil manfaatnya oleh suatu pihak, maka nafkahnya harus dijamin oleh pihak yang membatasi dan mengambil manfaatnya.³

Oleh karena yang menjadi penyebab wajibnya nafkah atas suami untuk istrinya adalah kewenangan suami untuk membatasi ruang gerak istri dan kerelaan istri untuk memberikan loyalitasnya,

³ Sayid Sabiq, *Fiq al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikir, Jilid 2, tt, hal.24

maka kewajiban memberikan nafkah tetap dibebankan atas diri suami selama hal yang menjadi sebabnya itu masih dimilikinya. Atas dasar itu, suami wajib menafkahi istrinya yang masih dalam masa iddah, baik disebabkan cerai talak atau bukan, baik dengan talak raj'i maupun dengan talak ba'in, baik dalam keadaan hamil atau tidak, dan baik perceraian disebabkan alasan yang datang dari suami atau dari istri, selain perceraian yang disebabkan perzinaan yang dilakukan istri. Kecuali yang disebut terakhir ini, maka wanita yang sedang dalam masa iddah wajib dinafkahi oleh suami yang menjatuhkan talaknya, dengan alasan karena pihak suami dalam hal tersebut masih tetap mempunyai hak untuk membatasi kewenangan perempuan yang telah ditalaknya selama masih dalam masa iddah, dan perempuan itu selama masih dalam masa iddah tetap terikat dengan ketentuan-ketentuan suami yang menolaknya. Istri yang dalam masa iddah tidak dibenarkan bepergian ke tempat-tempat jauh tanpa adanya izin suami yang telah menolaknya, namun wanita yang dalam keadaan iddah tidak dibenarkan menyerahkan dirinya untuk digauli suami yang telah menceraikannya. Konsekuensi dari ketentuan diatas, wanita yang dalam masa iddah, tidak wajib dinafkahi apabila ia tidak mau terikat dengan ketentuan-ketentuan suami sejauh dalam kewajaran. Bagi aliran Hanafiyah, kewajiban memberikan nafkah atas diri suami

adalah sebagai imbalan dari kewajiban istri untuk memenuhi ketentuan-ketentuan suaminya.⁴

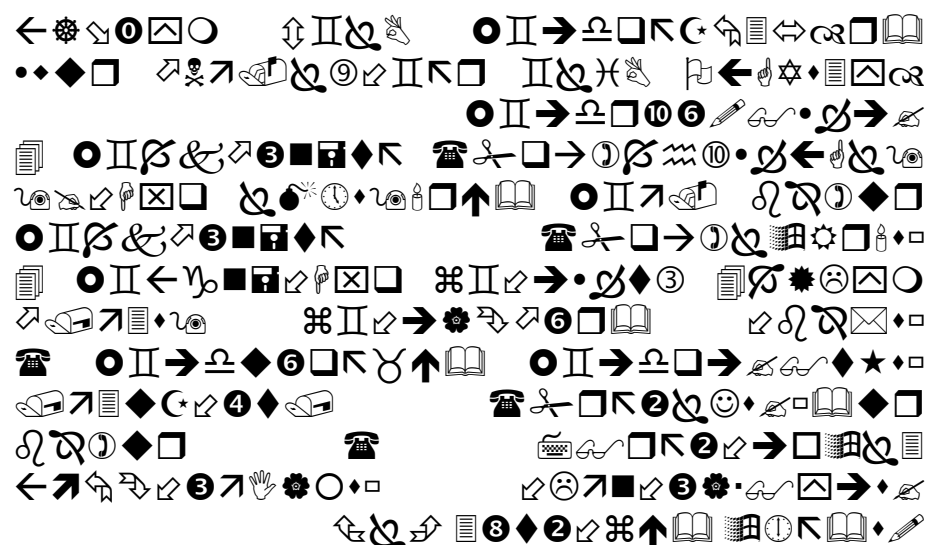
Oleh karena yang menjadi sebab kewajiban nafkah adalah suami berhak membatasi gerak-gerak istri dan istri wajib memberikan loyalitasnya kepada suami, maka hak nafkah menjadi gugur apabila istri tidak lagi memberikan loyalitas kepada suami. Nuzusy (keluar dari ketaatan) merupakan salah satu dari gugurnya hak nafkah bagi istri.

- b. Mayoritas ulama dari kalangan Jumhur berpendapat bahwa alasan mengapa pihak suami diwajibkan menafkahi istrinya adalah karena hubungan timbale balik antara suami dan istri. Atau dengan kata lain bahwa yang menjadi sebabnya adalah posisi suami sebagai suami dan isteri sebagai istri, termasuk kewajiban istri menyerahkan dirinya kepada suami secara sukarela untuk diperlukan sebagai istri. Hubungan suami-istri yang telah diikat dengan tali perkawinan sah di samping mempunyai konsekuensi di mana istri wajib bersedia menyerahkan diri kepada suaminya untuk diberlakukan sebagai istri, juga mempunyai konsekuensi di mana pihak suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya. Perbedaan dengan pemahaman mazhab Hanafiyah di atas adalah, pada mazhab Hanafiyah tersebut tekanan kewajiban nafkah adalah pada hak suami untuk membatasi kewenangan istri, sedangkan pada mazhab jumhur ini tekanan adanya kewajiban nafkah adalah pada

⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, jilid V, hal.

adanya kerjasama antara suami dan istri yang diikat dengan tali perkawinan. Maka apabila istri berkewajiban memberikan rasa gembira kepada suami, mengurus rumah tangga dan lain-lain, maka suami berkewajiban untuk mencari nafkah. Dalam hal ini yang terpenting adalah adanya pembagian tugas antara suami dan istri. Selama hubungan kerja sama suami-istri itu masih ada, maka selama itu pula kewajiban nafkah itu dipikul dipundak seorang suami.⁵

Oleh karena dianggap masih ada hubungan suami-istri, maka wanita yang sudah ditalak dengan talak raj'I, masih wajib dinafkahi oleh suami. Adapaun wanita yang ditalak ba'in, tidak wajib dinafkahi karena sudah dianggap putus sama sekali hubungan suami-istri. Menurut mazhab ini, wanita yang ditalak ba'in dan sedang dalam keadaan hamil, tidak wajib dinafkahi oleh suami yang menceraikannya, meskipun menurut kalangan Malikiyah dan Syafi'iyah, wanita seperti itu wajib disediakan tempat tinggalnya, berdasarkan ayat al-Quran yang



⁵ Ibid, hal. 277

Artinya : Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Menurut kalangan Malikiyah dan Syafi'iyah perintah dalam ayat tersebut mencakup memberikan tempat tinggal bagi wanita yang ditalak bai'n yang sedang dalam keadaan hamil, berbeda dengan itu, kalangan Hanabilah berpendapat wanita yang ditalak ba'in dan sedang dalam keadaan hamil, tidak wajib dinafkahi dan tidak pula wajib disediakan tempat tinggalnya.⁶

2. Kewajiban Nafkah Untuk Anak Kandung

Konsekuensi lain dari adanya akad nikah yang sah adalah kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak yang dilahirkan dalam perkawinan sah tersebut. Seorang ayah kandung wajib berkewajiban untuk memberikan jaminan nafkah anak kandungannya, dan seorang anak begitu dilahirkan berhak mendapatkan hak nafkah dari ayahnya baik pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan-kebutuhan lainnya.. Alasannya antara lain, hadis riwayat ibn Majah dan an-Nasai yang menceritakan bahwa seorang wanita, Hindun istri Abu Syufyan datang mengadu kepada Rasulullah

⁶ *Ibid*, hal. 331

tentang keengganannya suaminya untuk memberikan nafkah yang mencukupi kebutuhan anaknya.

Dalam literatur fiqh juga disebutkan, bahwa yang menjadi landasan atau sebab kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak, adalah kondisi anak yang sedang membutuhkan perbelanjaan. Anak yang masih belum mampu mandiri dalam pembelanjaannya, di mana ia hidup tergantung kepada adanya pihak yang bertanggungjawab untuk menafkahi anaknya. Dalam hal ini, orang yang paling dekat dengan seorang anak adalah ayah dan ibunya. Apabila sang ibu bertanggungjawab atas pengasuhan anak di rumah tangga, maka sang ayah bertanggungjawab untuk mencari nafkah anaknya.⁷

⁷ *Ibid*, hal. 337

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektifitas penyelesaian nafkah kadaluwarsa atau taqadum yang tidak ditunaikan oleh suami kepada istri dan anak-anaknya tidak diselesaikan di pengadilan agama, sebab sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, menyebutkan sesungguhnya tidak ada nafkah kadaluwarsa atau taqadum atau nafkah madhiyah untuk anak, oleh karenanya efektifitas penyelesaiannya adalah musyawarah tokoh agama di Kecamatan Bangkinang Seberang
2. Faktor-faktor yang menyebabkan suami tidak memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya adalah sebagai berikut:
 - a) Faktor ekonomi, artinya Suami tidak memberikan nafkah karena ia sedang dalam kesulitan, sehingga menyebabkan suami tidak member nafkah kepada istrinya.
 - b) Faktor Keengganan, factor ini adalah si suami enggan memberikan nafkah kepada istrinya padahal ia berada dalam keadaan lapang.
3. Dalam hukum Islam, adalah kewajiban ayah/suami yang menafkahi istri dan anak-anaknya, termasuk kewajiban menafkahi nafkah yang sudah kadaluwarsa atau taqadum, jika ayah/suami menelantarkan kewajiban menafkahi istri dan anak-anaknya, maka ayah/suami dapat dituntut untuk

mengganti rugi nafkah istri dan anak, juga dapat diancam dengan hukuman ta'zir

B. Saran.

- 1) Penelitian tentang gugatan kadaluwarsa nafkah di Bangkinang Seberang, mudah-mudahan kajian ini dapat dijadikan pijakan bagi peneliti-peneliti selanjutnya, demi terwujudnya kesempurnaan penelitian ini.
- 2) Di harapkan kepada masyarakat Kecamatan Bangkinang Seberang, khususnya suami yang meninggalkan anak dan isteri untuk dapat memberikan nafkah, agar tidak terjadi gugatan kadaluwarsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995
- Aminah Azis, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, USU Press, Medan, 1998
- Al Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI : Jakarta. 1987
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet.III, Yayasan Al Hikmah : Jakarta. 2001
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet,III, Raja Grafindo Persada: Jakarta. 1998
- Abdul Halim, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2000
- Abdul Rozak Husein, *Hak Anak Dalam Islam*, Fikahati Aneka. 1992
- Aminah Azis, , *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, USU Press : Medan 1998
- Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiati, , *Hukum Perdata Islam, Kompilasi Peradilan Agama tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah Wakaf dan Sadaqah*, Mandar Maju : Bandung. 1997
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*,Cet.III, Raja Grafindo Persada : Jakarta. 2001
- Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni : Bandung. Iman.1992
- Jauhari, *Hak-hak Anak Dalam Hukum Islam*, Pustaka Bangsa Press: Jakarta. 2003
- Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara : Jakarta. 1990
- Muhammad Jalaluddin Al Qosyimi, tanpa tahun, *Mau'izatul Mukminin*, Terjemahan, Bumi Aksara : Jakarta.
- Irma Setyowati Soemitro, *Kekuasaan Orang Tua Setelah Perceraian (Suatu Penelitian Di Desa Cukil, Sruwen dan Sugihan Kecamatan Tenganan, Dalam Majalah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1994.*

Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990

Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media 2004

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Bandung. PT. Alma'arif, 1980

Nung Muhjir, *Metodologi Penelitian* Jakarta: Gtafindo, 1999

Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh Islami wa adillatuhu*, Beirut Dar al-Fikri